

PENDAHULUAN

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Krisis multidimensional sedang dialami oleh bangsa Indonesia. Sejak kata reformasi digulirkan pada tahun 1997, berbagai masalah pun muncul ke permukaan. Berawal dari kasus korupsi yang telah mendarah daging, Kolusi yang merajalela diberbagai instansi, serta kasus Nepotisme di lingkungan kerja. Jelas hal ini tidak akan dengan mudah diberantas. Namun demi kemajuan bangsa, pemberantasan harus dilakukan, karena kalau tidak, tujuan akhir yang ingin dicapai tidak akan bisa terwujud.

Soeharto, yang merupakan pemimpin Indonesia selama tiga puluh dua tahun telah mewariskan permasalahan bangsa yang sangat berat bagi rakyat Indonesia. Namun, masa lalu harus dijadikan pelajaran bagi masa depan, maka dari itu bukanlah bangsa yang bijaksana ketika selalu menyalahkan apa yang telah terjadi dahulu. Setelah Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya, Habibie yang merupakan wakil Presiden pada saat itu langsung menggantikan posisi Soeharto. Ketika beliau menjabat kursi kepresidenan, kepercayaan investor asing mulai bermunculan. Habibie memiliki reputasi baik di lingkungan internasional, mengingat kerja sukses nya memimpin IPTN dan menjadi Menteri Riset dan Teknologi. Walau dengan kesuksesan yang sedemikian rupa, maksudnya, Habibie bisa meningkatkan

kepresidenan di Indonesia. Namun belum bisa memulihkan kepercayaan terhadap pemerintah.

Akhirnya, Habibie menyelesaikan tugasnya dan menolak untuk dicalonkan kembali, selain beliau dianggap antek dari orde baru, beliau merasa jabatan yang singkat itu sudah memberikan pengalaman yang cukup baginya.

Tahun 1999 pemilu raya pun dilaksanakan untuk memilih calon legislatif di DPR dan MPR RI. Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden berdasarkan pilihan dari para legislatif yang sudah terpilih di pemilu. Namun Mosi tidak percaya dikeluarkan oleh DPR pada saat itu. Kerena Gusdur dianggap ada keterlibatannya dengan kasus Bulog gate. Gusdur juga malah lebih sering melakukan lawatan ke luar negeri, dibandingkan mengurus masalah yang jelas sedang terjadi didalam negeri. Gusdur dianggap menghambur hamburkan uang negara. Setiap kebijakan yang dikeluarkan Gusdur selalu menjadi kontroversial berbagai kalangan. Hal yang paling di ingat ketika Gusdur ingin membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Dengan alasan negara negara muslim yang tergabung dalam OKI tidak bisa memberikan bantuan berupa dana yang dibutuhkan oleh Indonesia pada saat itu. Maka dari itu, Gusdur berfikir untuk melakukan kerja sama dengan Israel karena di rasa akan memberikan kontribusi yang dibutuhkan Indonesia. Kita juga cukup mengetahui, bahwa Israel adalah negara kecil yang telah menguasai Amerika Serikat yang notabene negara adi kuasa. Namun seperti kita ketahui pula, negara kita adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Israel adalah negara

muslim. Jelas ini sangat kontroversi pada saat itu. Rakyat mulai meragukan kepemimpinan Gusdur. MPR pun melakukan Sidang Istimewa untuk membahas kinerja Abdurrahman Wahid. Wahid tetap bersikukuh dengan jabatannya di kepresidenan dengan menggelar Dekrit Presiden yang padahal tidak di dukung oleh militer. Amin Rais selaku ketua MPR mencopot jabatan kepresidenan Gusdur. Megawati pun menduduki posisi Gusdur dikarenakan dia sebagai Wakil Presiden sebelumnya sampai pelaksanaan pemilu berikutnya.

Megawati menjalankan pemerintahan bersama jajaran menteri. Ia membentuk kabinet Gotong royong. Berbagai usaha dilakukan untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Tidak ada kesempurnaan di dunia ini. Termasuk kerja yang dilakukan Megawati dan jajarannya. Namun sedikit demi sedikit usaha itu membuahkan hasil.

Salah satu usaha Mega dalam memperbaiki perekonomian negara adalah mengeluarkan kebijakan imbal beli dagang. Konsep mengenai imbal dagang ini pernah digulirkan oleh mantan Presiden Soeharto, namun sampai Ia mengundurkan diri dari jabatannya, konsep itu belum terlaksana. Baru pada pemerintahan Mega, Imbal beli dilakukan. Mega berani menanggung resiko demi perbaikan itu. Ketika negara menginginkan peningkatan disektor non migas, dikarenakan tidak adanya dana untuk mengangkat ekspor migas, maka Imbal beli daganglah yang menjadi alternatif untuk solusinya. Efek yang ditimbulkan dari kebijakan itu sangat terlihat. Pemerintah berhasil mengadakan kerjasama imbal beli dengan berbagai negara, mulai

1. D. Mega Vietnam serta Thailand. Namun dampak negatifnya pun

pasti didapat. Contoh kasus pada permasalahan imbal dagang dengan Thailand, pemerintah menukarkan komoditas produk yang dihasilkan oleh PT. Dirgantara, PT. Inka berupa beberapa gerbong kereta api, dan produk urea dengan beras. Jelas Indonesia merupakan negara penghasil beras, para petani akan sangat terpukul dengan datangnya impor beras tersebut. Harga beras jelas anjlok karena beras impor tersebut jauh lebih murah dengan kualitas yang sama bagusnya dengan beras lokal.

Karena dengan permasalahan tersebut yang akhirnya pemerintah melakukan imbal dagang dengan Thailand berupa penukaran dengan beras, maka **“IMBAL DAGANG INTERNASIONAL INDONESIA – THAILAND (Studi kasus : Imbal dagang Pesawat Produksi PT. Dirgantara Indonesia, Gerbong Kereta Api PT. INKA, Pupuk dan Amoniak PT. Pusri dengan beras dari Thailand)** menjadi tema dari penulisan skripsi ini.

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Ingin mengetahui dampak apa saja yang dihasilkan ketika pemerintah melaksanakan kebijakan Imbal Beli dagang tersebut.
2. Ingin menjawab pokok permasalahan dan membuktikan terjawabnya hipotesa dalam skripsi ini.
3. Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program S1 pada jurusan

C. LATAR BELAKANG MASALAH

Krisis pada tahun 1997 merupakan awal dari semua krisis yang dialami oleh bangsa Indonesia. Utang pemerintah dan usaha swasta meningkat dahsyat, perbankan terpuruk, dan investasi asing drastis turun. Selain keterpurukan dibidang ekonomi, turunnya degradasi moral, penjarahan dan pembakaran terjadi dimana mana, kerusuhan dan pengrusakan sarana umum pun kerap dilakukan. Indonesia tidak aman, ini yang terjadi pada tahun 1997. Tampuk kepemimpinan silih berganti. Dari mulai pengunduran diri Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, kemudian B.J Habibie yang menjadi penggantinya, Abdurahman Wahid, sampai akhirnya Megawati Soekarno Putri.

Hampir empat tahun sudah Presiden Megawati -- setelah menggantikan dua presiden yang sebelumnya telah dianggap gagal mengeluarkan Indonesia dari krisis -- bersama jajaran kabinetnya memimpin penyelenggaraan pemerintahan. Awalnya kenaikan Megawati di kursi kepresidenan memunculkan banyak harapan bahwa ia beserta kabinet Gotong Royongnya dapat menyelesaikan berbagai persoalan didalam negeri ini. Krisis multidimensional yang kurang lebih telah berusia tujuh tahun merupakan persoalan pokok yang kini tengah dihadapi pemerintahan Megawati. Meski sulit untuk berharap bahwa semua persoalan krisis itu dapat diselesaikan dalam waktu yang pendek, namun penilaian -- terutama yang berasal dari publik -- terhadap upaya-upaya pemerintah untuk menuntaskannya perlu dilakukan.

Untuk mengatasi keterpurukan ekonomi, pemerintah Megawati

menetapkan berbagai macam kebijakan. Salah satu kebijakan ini adalah berupa

kebijakan Imbal dagang. Imbal dagang atau *counter trade* merupakan pemekaran atau pengembangan dari sistem barter. Kita mengetahui bahwa sistem barter adalah pertukaran barang yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu karena mereka tidak mempunyai alat pembayaran seperti sekarang, dalam hal ini adalah uang. Misalnya beras ditukar dengan pacul. Kopi atau pun hasil rempah ditukar dengan ayam dan bentuk hasil bumi lainnya.

Seiring dengan perkembangan jaman tadi, *counter trade* pengganti dari sistem barter tadi. Namun lingkungannya sudah sangat besar. Menurut Departemen Perindustrian dan Perdagangan, pengertian imbal dagang adalah suatu skema perdagangan atau praktek perdagangan dimana pemasok barang atau jasa menyetujui suatu kondisi dalam perjanjian jual beli untuk membahas (*reciprocity*) dan menyanggupi suatu persyaratan khusus tertentu sebagai kompensasi dan manfaat bagi jual beli, sehingga pemasok barang atau jasa wajib menerima barang atau memberi kompensasi lain kepada pembeli sebagai balasan atau pembayaran sebagian atau seluruh barang atau jasa yang dijual atau ditukarnya.¹

Counter Trade digunakan oleh negara. Dan sistem ini dilirik oleh negara-negara yang sedang berkembang. Saat peradaban manusia belum mengenal uang sebagai alat tukar dan alat bayar, perdagangan dilakukan dengan mempertukarkan komoditas bernilai relatif sama yang saling diperlukan dan dikehendaki. Ketika kini

perdagangan lazim ditransaksikan dengan uang, wajar jika imbal dagang dianggap sebagai langkah mundur, bahkan dianggap cara yang primitive.²

Imbal dagang sebenarnya menjadi bagian dari dinamika perdagangan dunia pasca Perang Dunia II. Pada masa Perang Dingin, dikotomi Blok Timur dan Blok Barat demikian tegas sehingga secara ekonomi dan bisnis pun kedua blok tersebut tersekat. Hegemoni pasar dunia oleh kekuatan Blok Barat saat itu menyebabkan negara-negara Blok Timur demikian terisolasi sehingga menyulitkan mereka untuk mendapatkan convertible currency.³

Karena mata uang negara-negara Blok Timur relatif tidak populer dan lebih sulit dipertukarkan, juga karena kualitas komoditasnya kalah bersaing, sulit bagi negara-negara Blok Timur melakukan penetrasi pasar dunia. Akibatnya, sampai akhir 1980-an imbal dagang intensif dijalankan oleh negara-negara Blok Timur sebagai mekanisme transaksi perdagangan internasional.⁴

Sebenarnya, imbal dagang tidak semata menjadi praktik yang didominasi negara-negara Blok Timur. Berdasarkan laporan Komisi Perdagangan AS, pada 1985 diketahui 5,6 persen ekspor AS ditransaksikan secara imbal dagang. Sukses imbal dagang di Blok Timur dan Barat ini menjadikan negara-negara sedang berkembang pun, terutama Indonesia dan negara-negara di Amerika Latin pun melakukan hal serupa.

Bahkan, mekanisme offsets, salah satu jenis imbal dagang yang dipergunakan untuk transaksi peralatan perang, pesawat tempur, atau pesawat penerbangan sipil, biasa dilakukan negara-negara maju. Tercatat Belgia dan Kanada hampir 20 tahun mempraktikkan transaksi offsets. Negara-negara Eropa Barat, termasuk Australia dan Selandia Baru, menggunakan offsets untuk sebagian besar kontrak pembelian peralatan militernya.⁵

Bahkan, pada 1986 Boeing Amerika Serikat sepakat mempergunakan offsets untuk 130 persen penjualan pesawat tempur kepada Inggris. Negara-negara NATO pun memperoleh peralatan militer melalui mekanisme offsets. Sedangkan Yugoslavia sampai awal 1990-an masih mempraktikkan imbal dagang, khususnya bentuk compensation. Figur ini menunjukkan bahwa sebenarnya imbal dagang tidak lagi dianggap sebagai sisi 'buruk' dalam kancah perdagangan internasional, tetapi sudah lebih diterima sebagai salah satu cara untuk bertransaksi.⁶

Jika dalam sejarahnya barter dilakukan karena orang belum mengenal uang, kini barter menjelma kembali dengan latar belakang persoalan yang berbeda. Tentu penjual dan pembeli jauh lebih menyukai dan menginginkan transaksinya dibayar dengan uang karena lebih liquid untuk memproduksi atau memenuhi kebutuhan lain.

Namun, jika para pihak tidak mempunyai cukup uang untuk mendanai transaksinya, imbal dagang menjadi alternatif solusi. Meskipun komoditas yang dipertukarkan diasumsikan saling diperlukan dan dikehendaki oleh setiap negara,

konversi harga dan penunaian pembayaran pada para pengusaha yang komoditasnya masuk pada daftar imbal dagang secara teknis tidak sederhana dan memerlukan waktu.⁷

Rentang waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses ini tentu berpengaruh pada cash-flow, efisiensi, dan siklus produksi. Perhitungan sangat mendasar inilah yang menyebabkan imbal dagang tidak dapat dijadikan pola perdagangan jangka panjang dan dipraktikkan terus-menerus. Jika sekadar diterapkan sebagai strategi membuka pasar, menciptakan pasar bagi komoditas baru, dan membangun network system, praktik imbal dagang cukup mengena. Terlebih, imbal dagang memang biasa dilakukan sebagai cara memasarkan produk-produk yang sulit dipasarkan secara 'normal'. Dalam konteks ini, imbal dagang merupakan jalan keluar terbaik dalam kondisi terburuk. Secara tajam pengamat ekonomi Didik J. Rachbini menyatakan "praktik imbal beli yang kini dikembangkan pemerintah Indonesia merupakan bukti kegagalan ekspor, karena itu juga merupakan kegagalan pemerintah".⁸

Di sini, pembelian satu produk, diimbangi pembelian produk atau komoditas pihak pembeli oleh pihak penjual. Salah satu contoh imbal dagang yang hampir dilakukan oleh era Orde Baru, yakni transaksi jet Sukhoi Su-30. Sedianya pesawat ini akan ditukar dengan komoditas kelapa sawit.

Pada masa pemerintahan Abdurrahman dan Megawati pun melakukan metode ini untuk perbaikan tingkat ekonomi didalam negeri. Terakhir, pada pekan pertama bulan Juni pada tahun 2002, isu imbal beli kembali muncul. Kesepakatan ini dilakukan dengan negara negara di kawasan Eropa Timur dan negara yang sedang berkembang. Seperti dengan Vietnam, yakni berencana melakukan imbal dagang (counter trade) terhadap proyek pembangunan pabrik pupuk di Vietnam. Nilai proyek pembangunan pabrik pupuk tersebut sekitar 300 juta dollar AS. Dari jumlah itu, sekitar 75 juta dollar AS-100 juta dollar AS ditutup melalui imbal dagang. "Kita merencanakan melakukan counter trade dengan Vietnam. Kita menawarkan untuk membangun pabrik pupuk di Vietnam yang harga gasnya lebih murah dari harga gas di Indonesia. Produknya juga akan lebih murah," katanya. Lebih lanjut Widjanarko mengatakan, sebagian dari proyek pembangunan pabrik pupuk itu akan ditukar dengan komoditas Vietnam yang dibutuhkan Indonesia. "Nanti mungkin akan kita tukar dengan komoditas yang kita butuhkan, seperti beras dan gula pasir, nilainya 75 juta juta dollar AS-100 juta dollar AS. Sementara nilai proyeknya 300- an juta dollar AS," katanya.⁹

Imbal dagang yang paling kontroversial dan mendapat reaksi sangat keras dari berbagai kalangan adalah yang dilakukan dengan Rusia. Indonesia membeli pesawat Sukhoi dan helikopter perang yang diganti dengan 30 komoditas non migas dari Indonesia. Transaksi ini merupakan hal paling populer bagi Bulog pada tahun 2003. Imbal dagang ini berharga senilai US\$ 192,9 juta. Mengapa dikatakan paling

populer dikarenakan hal ini dianggap menyalahi prosedur APBN. Bulog yang merupakan “pelaksana” menjadi sasaran tembak bagi DPR, walau pun akhirnya, tanggung jawab tersebut diberikan kepada Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang dipimpin oleh M. Rini Soewandi. Walau pada kenyataannya, Komisi I DPR RI pun menyetujui pelaksanaan tersebut, namun pihak DPR menyangkan kesalahan prosedur yang dilakukan.

Imbal dagang Sukhoi ini hanya melibatkan beberapa pejabat aja, sehingga mengakibatkan berbagai kecurigaan di Komisi I tentang ada nya korupsi lagi. Dikatakan salah prosedur, transaksi ini melanggar empat Undang undang, antara lain tentang Undang undang Pertahanan dan Undang Undang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN, namun akhirnya kesalahan yang dibuat Menteri Deperindag ini “dimaafkan” oleh DPR RI dengan catatan tidak melakukan kesalahan yang sama. Dan DPR mengetahui setiap transaksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak.¹⁰

Sama halnya dengan imbal dagang yang lainnya. Megawati mengambil kebijakan imbal beli dagang dengan Thailand, yakni pengiriman produk produk hasil PT. Dirgantara Indonesia, tiga ratus gerbong kereta, satu pesawat dan pupuk urea. Setelah berlarut-larut dan sempat terhambat, rencana imbal dagang (counter trade) antara Thailand dan Indonesia dengan nilai total 200 juta dollar AS dapat dilanjutkan.

Sebelumnya, rencana imbal dagang antara Thailand dan Indonesia yang tercetus tahun lalu sempat terhambat karena Thailand tidak bersedia menerima

¹⁰ Gatra, Selasa 2 September 2003

pesawat terbang (fixed wing) yang ditawarkan Indonesia dan lebih memilih pupuk. Sikap Pemerintah Thailand itu ditegaskan Menteri Luar Negeri Thailand Surakiart Sathirathai, saat mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Aburizal Bakrie.¹¹

Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) yang mengimpor beras 200.000 ton sebagai bagian dari imbal dagang (*counter trade*) dengan Thailand pada periode Januari-Februari 2004. Nota kesepahaman (MoU) imbal dagang dengan beras total sebanyak 400.000 ton senilai 100 juta dolar AS telah dilakukan pada Juni 2003 dan kelak beras impor itu ditujukan ke daerah konsumsi di luar Jawa, yaitu Belawan, Padang, Lhoksemawe, Kupang, Belitung, Balikpapan, dan lain-lain.¹²

"Membeli beras tidak seperti membeli di pasar. Untuk imbal dagang dengan Thailand, kami melakukan pengkaplingan beras sebanyak 400.000 ton dari Thailand untuk ditukar dengan 300 unit gerbong kereta, satu pesawat, dan pupuk," kata Dirut Perum Bulog, Widjanarko Puspoyo di sela-sela silaturahmi jajaran Perum Bulog di Jakarta.¹³

Namun imbas dari pelaksanaan imbal dagang ini dirasakan oleh para petani. Selain berpengaruh terhadap harga jual gabah, hal ini berpengaruh juga terhadap daya beli dimasyarakat. Banyak masyarakat yang lebih memilih barang impor dengan kualitas yang bagus dan harga yang relatif murah dibandingkan dengan beras lokal

¹¹ <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0305/28/ekonomi/336542.htm>

dengan harga diatas beras impor. Jelas para petani merasa terpukul dengan ini. Setelah harga gabah sangat turun dengan datangnya beras luar, ditambah masyarakat lebih memilih produk luar.

D. PERUMUSAN MASALAH

Dari penjelasan tadi di dapat permasalahan, yakni :

Apa pengaruh dari pelaksanaan Imbal dagang pada masa pemerintahan Megawati terhadap :

- **Ekspor Indonesia ke Thailand?**
- **Pemenuhan kebutuhan tambahan cadangan pangan berupa beras Indonesia?**
- **Harga beras didaerah tujuan beras yang diimbaldagangkan?**

E. KERANGKA BERFIKIR

Teori diibaratkan sebagai beberapa bangunan konsep yang berguna memberi pemahaman terhadap permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, baik yang berupa penjelasan maupun ramalan. Dan teori merupakan alat untuk menganalisa sebuah peristiwa mengapa peristiwa itu dapat terjadi. Ada pun teori bisa diibaratkan pula sebagai pisau untuk mengupas permasalahan yang ada.

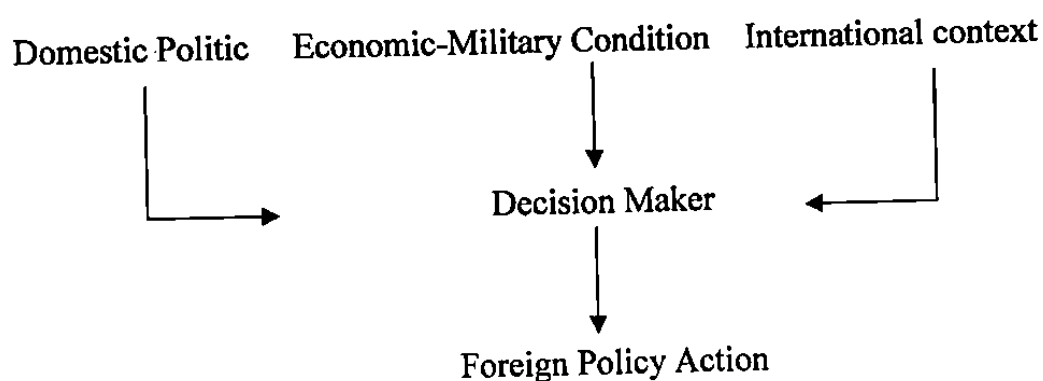
Teori Pembuatan Keputusan (Decision Making Theory)

Menurut William D. Coplin, "Apabila kita akan menganalisa kebijaksanaan

dalam membentuk kebijaksanaan Politik Luar Negeri. Dan salah besar jika menganggap para pembentuk kebijaksanaan luar negeri bertindak sebagai akibat tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil kebijaksanaan luar negeri :

1. Kondisi politik dalam negeri termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku manusianya.
2. Situasi ekonomi dan militer di negara tersebut, termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan atau keamanan.
3. Konteks internasional (situasi di negara yang menjadi tujuan Politik Luar Negeri) serta pengaruh negara negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.¹⁴

Proses Pengambilan Keputusan Menurut William D. Coplin



Sumber : Prospektif Volume 4 no. 4, 1992

mempengaruhi kebijakan luar negerinya. Kondisi Ekonomi mungkin bisa dikatakan sebagai faktor penentu dalam pengambilan keputusan saat itu. Karena inti masalah didalam suatu masyarakat adalah tingkat kesejahteraan. Ketika kesejahteraan telah dicapai, maka keadaan negara cenderung aman, militer tidak terlalu disibukkan dengan situasi yang tidak nyaman, walau peran militer tidak bisa disepelekan. Maka dari itu, dengan tuntutan perbaikan ekonomi, maka Megawati mengambil keputusan untuk mengadakan imbal dagang yang akhirnya turut mempengaruhi negara mana saja yang akan dituju demi tercapainya usaha peningkatan ekonomi tadi.

Kondisi internasional turut berperan dalam mempengaruhi para pengambil keputusan. Contohnya saja mengenai terorisme yang sedang gencar gencarnya diperbincangkan dilingkup inetransional, pemerintah segera mengambil tindakan agar bisa melindungi negara dan isinya. Pemerintah mengeluarkan Perundang-undangan yang mengatur tentang teroris tadi. Perlu diketahui, Indonesia hampir mendapat label teroris karena pada saat itu, para teroris indentik dengan agama Islam, dan Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas muslim.

Konsep Kepentingan Nasional

Setiap negara dengan pemerintahan yang ada didalamnya, akan menentukan suatu kebijakan berdasarkan dengan kepentingan nasional negara bersangkutan pada saat itu. Maka dari itu Konsep kepentingan nasional pun akan dipakai untuk

Morgenthau berpendapat bahwa isi dari kepentingan nasional itu ditentukan oleh tradisi politik dan konteks kultural keseluruhan di dalam mana suatu negara merumuskan politik luar negerinya.¹³

Menurut Jack. C. Plano dan Roy Olton, Kepentingan nasional (national interest) adalah tujuan mendasar serta faktor yang paling menentukan untuk memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsepsi umum, tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi suatu negara. Kelangsungan hidup suatu negara dan bangsa, kemerdekaan, keutuhan wilayah, pertahanan dan keamanan, dan kesejahteraan ekonomi.¹⁴

Sedangkan menurut Charles O. Lerche dan Abdul A. Said, kepentingan nasional memiliki sasaran sebagai berikut :

“... self preservation (of the collective of the state and its human and territorial manifestation), security, well-being, prestige, power, the promotion and/or protection of ideology or any other as defined, synthesized and given from by the decision makers of country is considered as the general, long term, and continuing purpose which the state, the nation, and the government all see themselves as serving”¹⁵

Konsep Kepentingan Nasional Indonesia tercantum dalam Pembukaan atau Preamble Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang dijabarkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No. IV/MPR/1999 tentang

¹³ H.J. Morgenthau di kutip dalam Mochtar Mas'oe'd, Ilmu Hubungan Internasional *Disiplin dan Metodologi*, PAU – Studi Sosial UGM, Yogyakarta, 1988, hal. 92.

¹⁴ Jack C. Plano, Roy Olton, *The National Relations Dictionary*, terj. Wawan Juanda, Third Edition, Clio Press Ltd., England, 1982, hal. 7

¹⁵ Charles O. Lerche Jr, Abdul A. Said, *Concept of International Politics*, Prentice Hall, New Jersey Inc., Englewood Cliffs, 1963, hal. 9-12

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Tujuan Nasional yang termaktub dalam GBHN adalah berperikehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dan membentuk pemerintah negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Lebih focus lagi, bahasan mengenai Kepentingan Nasional tadi dibahas dalam bidang Ekonomi, yakni Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan rakyat. Mengelola kebijakan makro dan mikroekonomi secara terkoordinasi dan sinergis guna menentukan tingkat suku bunga wajar, tingkat inflasi terkendali, tingkat kurs rupiah yang stabil dan realistis, menyediakan kebutuhan pokok terutama perumahan dan pangan rakyat, menyediakan fasilitas publik yang memadai dan harga terjangkau, serta memperlancar perizinan yang transparan, mudah, murah, dan cepat. Mengembangkan kebijakan fiskal dengan memperhatikan prinsip transparansi,

Dagang adalah Politik Nasional yang berusaha menjadi bagian pemenuhan Kepentingan Nasional.

F. HIPOTESA

Setiap sesuatu pasti terdapat dua sisi yang berlainan, seperti dua sisi mata uang. Begitu pula dengan positif dan negatifnya suatu pengaruh. Pengaruh dari pelaksanaan imbal dagang pada masa pemerintahan Megawati adalah :

- Memberikan kontribusi terhadap peningkatan impor dan ekspor non migas Indonesia
- Kebutuhan pangan nasional pada saat pelaksanaan imbal dagang terpenuhi, dalam hal ini adalah beras.
- Imbal dagang mempengaruhi harga beras nasional.

G. JANGKAUAN PENELITIAN

Penulisan ini didasarkan pada masa pemerintahan Megawati yang melaksanakan imbal beli dagang dengan Thailand mulai ditandatanganinya MoU sampai terlaksananya kesepakatan tersebut.

H. PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik penggunaan data sekunder yang di peroleh dari makalah, jurnal, Ensiklopedia, Media Massa baik cetak mau pun

G. JANGKAUAN PENELITIAN

Penulisan ini didasarkan pada masa pemerintahan Megawati yang melaksanakan imbal beli dagang dengan Thailand mulai ditandatanganinya MoU sampai terlaksananya kesepakatan tersebut.

H. PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik penggunaan data sekunder yang di peroleh dari makalah, jurnal, Ensiklopedia, Media Massa baik cetak mau pun elektronik, internet, serta sumber sumber pendukung lainnya.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I : Pendahuluan yakni alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka berfikir, hipotesa, jangkauan penelitian, pengumpulan data, sistematika penulisan, kerangka penulisan.

Bab II : Membahas keadaan Indonesia pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, meliputi bidang politik, pertahanan dan keamanan, dan dibidang ekonomi, serta pembahasan mengenai keadaan ekonomi sebelum dan sesudah dilaksanakannya imbal dagang.

Bab III : Dalam bab ini akan dibahas pelaksanaan dari imbal dagang itu sendiri. Membahas mengapa Thailand sebagai negara tujuan serta produk produk apa saja yang telah diimbaldagangkan dengan negara ini.

Bab IV : Membahas pengaruh di sektor non migas diluar barang yang di